

Potensi dan Tantangan Wisata Edukatif di Lumajang dalam Perspektif Islam

Arini Indah Nihayaty *

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan, Indonesia

* Corresponding author: arini@stital.ac.id

Article history: Received December 4, 2023 | Revised December 30, 2023 | Accepted December 31, 2023

Please cite this article (Turabian of style 8th edition): Arini Indah Nihayaty "Potensi dan Tantangan Wisata Edukatif di Lumajang dalam Perspektif Islam". *NUSANTARA: Indonesian Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (Januari 1, 2024): 93-114. Accessed January 1, 2024.

Abstrak:

Artikel ini mengkaji potensi dan tantangan pengembangan wisata edukatif di Kabupaten Lumajang dalam perspektif Islam. Wisata edukatif dipahami tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran, pembentukan karakter, dan penguatan spiritualitas generasi muda. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Lumajang memiliki modal besar untuk mengembangkan wisata yang tidak sekadar berorientasi ekonomi, tetapi juga sarat nilai-nilai pendidikan dan religiusitas. Dalam perspektif Islam, kegiatan wisata dapat menjadi bagian dari proses tadabbur dan tazkiyah, yang mendorong manusia untuk mengambil pelajaran dari alam, menghargai ciptaan Allah, serta membentuk kepekaan sosial. Namun demikian, keberhasilan wisata edukatif sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sinergi antar-pemangku kepentingan, serta kebijakan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam pembangunan pariwisata sebagai wujud dari pembangunan manusia seutuhnya dalam bingkai keberagamaan.

Keywords: wisata edukatif, perspektif Islam, infrastruktur, maqāṣid al-syarī'ah, pendidikan karakter.

Pendahuluan

Pariwisata dalam perspektif Islam bukan hanya dimaknai sebagai kegiatan rekreasi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan tadabbur terhadap ciptaan Allah Swt. Islam mendorong umatnya untuk bepergian (*sīrah fi al-ard*) guna mengambil pelajaran dari sejarah, memahami kekuasaan Allah dalam penciptaan alam, dan memperkuat keimanan melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks ini, wisata edukatif dapat menjadi media dakwah dan tarbiyah, terutama bagi generasi muda, agar mereka tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga menghayati nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mendorong perlindungan terhadap akal, jiwa, dan lingkungan hidup.

Kabupaten Lumajang memiliki beragam destinasi alam yang berpotensi dikembangkan sebagai wisata edukatif berbasis nilai-nilai Islam, seperti air terjun, gunung, dan situs-situs budaya. Namun, pengembangan wisata semacam ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan kebijakan publik yang inklusif, agar tujuan edukatif dan spiritual dapat tercapai secara optimal. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, wisata edukatif yang berakar pada etika Islam mampu menanamkan tanggung jawab moral kepada generasi muda, mendorong kepedulian sosial, serta menguatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ciptaan Allah sebagai bentuk penghambaan. Oleh karena itu, pembangunan wisata di Lumajang perlu diarahkan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembinaan karakter dan nilai-nilai keislaman.

Pariwisata modern tidak lagi dipandang semata-mata sebagai aktivitas hiburan atau relaksasi, melainkan telah berkembang menjadi medium pembelajaran yang efektif dan transformatif, terutama bagi kalangan muda. Konsep *wisata edukatif* hadir sebagai jawaban atas kebutuhan generasi muda untuk mengeksplorasi pengetahuan secara kontekstual, menyenangkan, dan aplikatif. Melalui kegiatan wisata yang dikemas secara edukatif, generasi muda dapat memahami sejarah, budaya lokal, ekologi, hingga nilai-nilai kewirausahaan berbasis potensi

daerah. Dengan kata lain, wisata edukatif merupakan ruang belajar alternatif yang bersifat partisipatif dan memberdayakan.

Kabupaten Lumajang memiliki semua prasyarat untuk mengembangkan wisata edukatif, mulai dari kekayaan alam seperti pegunungan, pantai, dan danau, hingga warisan budaya serta keberadaan situs sejarah. Di samping itu, tingginya partisipasi kaum muda yang telah menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar daerah, membuka peluang besar untuk mentransformasi sektor pariwisata menjadi laboratorium pembelajaran sosial dan lingkungan hidup. Objek-objek wisata di Lumajang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak menjadi instrumen pendidikan karakter dan pengetahuan kontekstual bagi generasi penerus.

Urgensi pengembangan wisata edukatif di Lumajang semakin kuat seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya pendidikan yang berbasis nilai, pengalaman, dan penguatan jati diri lokal. Kegiatan wisata yang sarat muatan edukatif dapat membentuk kesadaran ekologis, memperkuat kebanggaan identitas daerah, serta membangun semangat kewirausahaan berbasis kearifan lokal. Generasi muda tidak hanya menjadi wisatawan, tetapi juga aktor perubahan yang terlibat dalam pelestarian alam, promosi budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Dengan konteks ini, kajian tentang wisata edukatif di Lumajang menjadi penting untuk dilakukan. Naskah ini berupaya menjelajahi bagaimana potensi wisata alam dan budaya yang tersebar di seluruh kecamatan di Lumajang dapat dikembangkan menjadi ruang edukatif bagi anak muda. Kajian ini juga menguraikan tantangan dan strategi pengelolaan wisata edukatif yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendekatan ini diyakini dapat mendorong terciptanya pariwisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter bangsa.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kawasan di provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi alam. Khususnya,

bila dihubungkan dengan sektor pariwisata, di mana objek wisata selalu punya korelasi dengan pergerakan ekonomi kerakyatan. Lumajang memiliki pesisir pantai hingga daerah pegunungan yang populer dengan keindahannya. Asalkan dikelola dengan baik potensi alam yang ada di Lumajang dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan masyarakat¹.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memiliki peluang besar untuk bisa mengembangkan pariwisata. Meskipun, tantangan yang dihadapi juga tidak kecil. Pemkab Lumajang harus cermat sehingga objek-objek wisata yang sejatinya bersifat umum atau milik publik jangan sampai manis madunya hanya bisa dinikmati segelintir pihak. Strategi manajemen konflik dibutuhkan pemerintah daerah dalam tiap kebijakan mengelola sumber daya di kawasan tersebut.

Optimalisasi berbagai sektor penopang pembangunan bisa dilakukan dengan melibatkan kalangan kampus. Dengan kata lain, Pemkab Lumajang bisa menggandeng perguruan tinggi lokal sebagai mitra bediskusi, melakukan riset, maupun memberi wawasan guna pertimbangan merumuskan kebijakan. Pasalnya, sudah ada banyak perguruan tinggi di daerah ini, di mana para akademisinya tentu lebih paham dengan kondisi maupun kerarifan lokal bila dibandingkan dengan akademisi dari luar kawasan ini. Apalagi, sudah banyak akademisi lokal yang berkiprah di kampus lokal namun telah belajar di kota-kota besar bahkan luar negeri.

Tidak sedikit pula kaum muda Lumajang yang telah menempuh pendidikan tinggi di luar kota seperti Jember, Malang, Surabaya, dan lainnya, kemudian kembali ke Lumajang untuk berkarya. Meski demikian, seandainya dunia pariwisata lokal terbangun secara masif berkelanjutan, mereka yang telah merantau ke luar kota dan menjadi manusia berkualitas setelah mengenyam pendidikan formal maupun nonformal di rantau, akan lebih bersemangat untuk kembali ke Lumajang untuk ikut membangun daerah.

Pariwisata bisa dikembangkan tidak hanya melalui industri kreatif maupun ekonomi *an sich*. Mereka yang ahli di bidang bahasa,

¹ Ferdi Wahyu Agustian, “Analisis Daya Saing Industri Pariwisata Pada Kabupaten Lumajang Dan Peningkatan Ekonomi Daerah,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* 6, no. 4 (2022): 653–664.

keterampilan mengemudi kendaraan, hingga bercocok tanam maupun kerajinan tangan, pasti ikut mendapat imbas positif. Hal semacam ini bisa dilihat di provinsi Bali yang telah membangun pariwisata sehingga banyak sektor dan Sumber Daya Manusia pula yang turut berkembang.

Dengan merancang kawasan wisata sebagai ruang pembelajaran, Kabupaten Lumajang dapat menciptakan sinergi antara sektor pendidikan, budaya, dan ekonomi lokal. Anak-anak muda yang selama ini hanya menjadi penonton atau konsumen wisata dapat dilibatkan aktif sebagai pemandu, kreator konten wisata, atau pelaku ekonomi kreatif. Selain memberikan pengalaman belajar yang aplikatif, keterlibatan ini juga melatih kepemimpinan, tanggung jawab sosial, serta kecintaan terhadap tanah kelahiran. Melalui pendekatan ini, wisata edukatif di Lumajang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter dan daya saing generasi muda.

Konsep wisata edukatif dapat menjadi solusi konkret dalam menjawab tantangan bonus demografi dan transformasi digital. Generasi muda Lumajang yang melek teknologi dapat didorong untuk mengembangkan ekosistem wisata yang interaktif—menggabungkan teknologi informasi, media sosial, dan narasi lokal yang inspiratif. Dengan sentuhan digital yang kreatif, potensi wisata alam dan budaya dapat disulap menjadi media pembelajaran yang viral, inspiratif, dan bernilai edukatif tinggi. Jika dimaksimalkan, model ini akan menciptakan ruang belajar lintas generasi yang menyenangkan sekaligus produktif.

Oleh karena itu, pengembangan wisata edukatif bagi anak muda di Lumajang bukan hanya wacana tambahan dalam pembangunan daerah, melainkan bagian integral dari strategi pendidikan berbasis potensi lokal. Diperlukan kemauan politik, komitmen kebijakan publik, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pelaku wisata. Jika semua unsur ini berjalan seirama, maka wisata edukatif akan menjadi instrumen penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Lumajang secara berkelanjutan.

Metode

Di antara teori yang dipakai adalah tentang kebijakan publik yang menjelaskan tentang keharusan pemerintah di level pusat, regional, maupun daerah, untuk berinovasi dalam berbagai bidang untuk melayani publik². Di mana optimalisasi objek wisata merupakan tantangan di era kekinian, termasuk bagi Lumajang yang punya potensi dan butuh pergerakan ekonomi dari poros tersebut. Selain itu, dipaparkan pula analisis berdasarkan teori korelasi antara optimalisasi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan pariwisata pasti ikut menaikkan daya beli masyarakat³.

Tak kalah menarik, saat sebuah wilayah sektor pariwisatanya meningkat, semangat masyarakat untuk berkarya dan produktif dapat ikut terangkat. Dalam teori sosial, lingkungan selalu mempengaruhi perilaku manusia yang ada di dalamnya. Manusia yang tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan akan tersingkir dengan sendirinya⁴.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif. Tujuan dari studi kualitatif adalah mendeskripsikan kondisi sosial secara faktual dan mengelaborasinya dengan teori yang sesuai⁵. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang menjadikan bahan literatur sebagai sumber data utama⁶. Bahan literatur yang dimaksud antara lain, buku, artikel ilmiah, dan informasi lain yang ada di media tertulis maupun media dalam jaringan. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi atau pemilahan data, penyajian secara komprehensif sesuai topik, dan memformulasikan kesimpulan⁷.

² B Cohen, "The Smartest Cities In The World 2015."

³ Oka A Yoeti, *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).

⁴ D. Kenrick, S. L. Neuberg, and R. B. Cialdini, *Social Psychology* (New York: Pearson Education, 2015).

⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

⁶ M. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

⁷ M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publishing Inc, 1994).

Penyajian data disampaikan melalui kategorisasi yang disesuaikan dengan temuan agar paparan menjadi gampang dipahami⁸.

Urgensi Infrastruktur yang Memadai

Pembangunan sektor pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kesiapan infrastruktur yang memadai. Namun di era saat ini, wisata tidak hanya dimaknai sebagai sarana hiburan dan relaksasi, melainkan juga sebagai media pembelajaran yang efektif, khususnya bagi kalangan muda. Dalam kerangka itulah, konsep *wisata edukatif* menjadi relevan untuk dikembangkan, di mana pengalaman berkunjung ke tempat wisata tidak hanya memberi kesan estetika dan rekreasi, melainkan juga membentuk kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, serta pemahaman kontekstual terhadap lingkungan dan budaya lokal. Infrastruktur yang baik akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya wisata edukatif yang fungsional dan berkelanjutan.

Kabupaten Lumajang, dengan ragam lanskap alamnya yang kaya, memiliki potensi besar untuk menghadirkan wisata edukatif yang menyatu dengan pengalaman belajar anak muda. Objek-objek seperti air terjun, danau, kawasan pertanian, hingga situs sejarah dan kawasan rawan bencana sebenarnya dapat dikembangkan sebagai laboratorium alam dan sosial yang memicu daya pikir kritis generasi muda. Namun demikian, potensi tersebut tidak akan bisa dimaksimalkan tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan yang aman, fasilitas air bersih, sanitasi yang layak, serta akomodasi yang mendukung kegiatan belajar informal. Wisata edukatif yang minim infrastruktur justru berisiko menciptakan pengalaman buruk dan gagal mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan berbasis pengalaman (*experiential learning*), infrastruktur bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari desain pembelajaran itu sendiri. Ketika anak muda diajak

⁸ R Bogdan and S. J. Taylor, "Looking at the Bright Side: A Positive Approach to Qualitative Policy and Evaluation Research.," *Qualitative Sociology* 13, no. 2 (1990): 183–192.

untuk memahami pentingnya konservasi lingkungan di sekitar air terjun, misalnya, keberadaan sarana edukatif seperti papan informasi, tempat ibadah, toilet, tempat duduk, dan jalur aman akan menunjang keseluruhan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di kawasan wisata harus diarahkan tidak hanya untuk kenyamanan wisatawan, tetapi juga untuk menunjang fungsi edukatif, partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya anak muda yang menjadi agen perubahan masa depan Lumajang.

Sejumlah literatur menyebutkan bahwa infrastruktur merupakan prasarana sebagai penopang eksistensi sarana. Dalam konteks pelayanan publik, infrastruktur merupakan modal pokok milik publik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Modal publik yang dimaksud antara lain, jalan, jembatan, pemukiman, sistem aliran air maupun jaringan listrik dan komunikasi, saluran pembuangan dan sanitasi, serta elemen-elemen lain yang menjadi basis energi⁹.

Bila mengacu pada fungsi direktorat jenderal yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), setidaknya ada empat jenis infrastruktur; sumber daya air, bina marga yang mengurus jalan dan jembatan atau transportasi secara umum, cipta karya yang berhubungan dengan bangunan ideal dan sanitasi, serta perumahan yang mengurus pemukiman tempat tinggal. Bisa dipastikan, dalam upaya optimalisasi pariwisata, empat jenis infrastruktur itu mutlak diperlukan.

Wisatawan membutuhkan air yang cukup dan layak selama berada di tempat wisata. Mereka tidak mungkin ke kamar kecil hanya dengan modal tisu atau batu. Tentu, pembahasan ini bukan seputar puncak gunung yang merupakan tempat wisata pula bagi para pendaki dan kedalaman laut yang adalah tempat wisata bagi penyelam. Apa yang dibahas adalah tempat wisata pada umumnya, yang di sana membutuhkan tempat buang air dan atau kamar mandi. Bahkan di tempat wisata pantai atau sungai pun, peloncong butuh tempat itu untuk membilas diri. Pasokan air yang higienis juga otomatis menjadi kebutuhan yang kongkret.

⁹ N. Gregory Mankiw, *Principles of Macroeconomics* (Boston: Cengage Learning, 2020).

Di Lumajang ada sebuah air terjun mini yang indah bernama Ratu Agung. Lokasinya di Desa Buwek Kecamatan Randuagung. Objek wisata ini pernah *ngebit* di akhir 2021 hingga pertengahan 2022. Sayangnya, saat dikunjungi pada 20 Mei 2023 sekitar pukul 16.00, lokasi itu tampak kurang tertata sehingga air yang selayaknya jernih justru terkesan kurang bersih. Ada seekor kuda yang tengah dimandikan hari tepat di sebelah hulu dari air terjun mini, sehingga orang yang datang enggan menceburkan diri di air terjun. Di sana juga tidak tampak ada kakus yang pantas, sehingga saat ingin buang air, seorang pengunjung menyusuri kali untuk mengeluarkan hajatnya di sebelah hilir.

Bila ditelaah, problem di sana tidak hanya karena absennya infrastruktur air bersih untuk pemenuhan kebutuhan pengunjung. Namun, ada aspek infrastruktur cipta karya semisal tidak adanya bangunan kakus untuk mendukung tempat tersebut bisa eksis secara berkelanjutan. Apalagi, untuk mencapai air terjun tersebut, jalan maupun jembatan yang perlu dilewati kurang tertata dengan baik. Tentu saja, ada beberapa ruas jalan alternatif untuk ke sana. Faktanya, salah satu lintasan mempertemukan pengunjung dengan penyebaran rel kereta api aktif yang belum disesuaikan dengan baik landasannya. Sehingga, sepeda motor apalagi mobil kesulitan untuk melewatinya.

Selain sumber daya air dan hal sehubungan dengan bangunan cipta karya, infrastruktur transportasi tidak kalah fundamental. Jalan dan jembatan mesti dalam kondisi prima jika memang objek wisata ingin dikembangkan dengan baik. Informasi mengenai jalan dan jembatan di sekitar tempat wisata juga mesti telah tersampaikan secara holistik. Sebagai contoh, ada tempat wisata yang hanya bisa dicapai dengan jenis mobil tertentu, ada pula yang tidak bisa dicapai dengan sepeda motor matic, dan beragam jenis medan transportasi dengan keunikan masing-masing.

Informasi semacam ini mesti pula dikemukakan dan turut dipromosikan tatkala promosi objek wisata tersebut digaungkan di

publik. Infrastruktur jalan dan jembatan tidak melulu soal lintasan. Aspek pendukungnya perlu pula diperhatikan, khususnya, soal penerangan dan pengamanan jalan itu sendiri.

Tidak semua objek wisata di Indonesia yang telah mendunia memiliki infrastruktur jalan dan jembatan yang baik. Salah satu objek wisata yang populer di dunia internasional namun akses transportasinya belum terlalu baik adalah air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo. Ada banyak jalur alternatif menuju tempat tersebut, dan seharusnya pula semua jalur dalam kondisi baik. Terlebih, objek wisata ini disebut-sebut tidak kalah cantik dibandingkan tempat-tempat di negeri maju. Salah satu lintasan menuju kawasan ini adalah dari pusat Lumajang. Dari pusat kota menuju Tumpak Sewu, pasti akan melalui Gladak (Jembatan) Perak atau yang belakangan dinamai Jembatan Besuk Kobo'an. Jembatan ini sempat ambruk diterjang lahar dingin yang meranjah bagian bawahnya pada 4 Desember 2021. Di bawah jembatan ini memang merupakan aliran lahar dingin Gunung Semeru. Awal tahun 2023, jembatan baru yang lebih kokoh telah dibangun, dan semoga pondasinya tetap tegap meski di kemudian hari, bisa jadi, kembali dilalui lahar dingin. Jembatan baru ini juga merupakan salah satu destinasi wisata baru yang turut membuka peluang UMKM berjualan di daerah tersebut.

Apabila pengunjung hanya berwisata di sekitar jembatan tentu bukan masalah besar. Problemnnya adalah saat makin banyak pengunjung yang duduk-duduk di jembatan. Padahal, ruas itu merupakan penghubung Lumajang-Malang yang tergolong ramai kendaraan, termasuk truk. Saat ini, orang yang duduk-duduk di jembatan mungkin belum banyak, namun ke depan, bisa jadi makin meluap. Ini jelas bahaya, karena jembatan bukan diperuntukkan bagi mereka yang berhenti di tengahnya dan memarkir kendaraan di sana. Kondisi ini adalah pekerjaan rumah Pemkab Lumajang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Satpol PP, juga kepolisian setempat khususnya Satlantas.

Kembali ke persoalan infrastruktur menuju objek wisata kebanggaan Lumajang air terjun Tumpak Sewu, di mana lintasan dari Gladak Perak menuju lokasi tersebut relatif kurang penenarangan di

malam hari. Apalagi, di kawasan sekitar Gladak Perak yang merupakan lereng perbukitan, yang bila dari arah Lumajang menuju Malang, pengendara menemukan bahwa di sisi kirinya adalah jurang curam. Sedangkan jika pengendara dari arah Malang menuju Lumajang, jurang curam itu berada di sebelah kanan. Parahnya lagi, infrastruktur berupa pagar pembatas antara jalan dan jurang tersebut nyaris tidak ada.

Pembangunan pagar adalah domain dari pihak yang menangani aspek cipta karya. Oleh karena ini merupakan jalan provinsi atau nasional, Pemprov atau Kementerian PUPR selayaknya memberi atensi. Pemkab bisa berkoordinasi untuk menangani pembangunan penerangan maupun pagar pembatas dengan dua pihak tadi.

Sebagai jalur yang tepat di pinggirnya adalah jurang, yang jurang itu juga terhubung dengan aliran cekungan lahar dingin semeru, sudah sepantasnya jalan tersebut mempertimbangkan aspek bencana alam. Kalaupun pada saat pembangunan awal belum terlampaui diperhatikan soal mitigasi itu, mempertimbangkannya saat ini bukan hal yang keliru. Maksudnya, jalur-jalur menuju objek wisata unggulan sepatutnya diberi perhatian sepanjang waktu, untuk dijaga maupun dibenahi.

Jenis infrastruktur lain yang perlu dimiliki daerah wisata adalah perumahan, dalam hal ini *homestay* bagi wisatawan. Di banyak daerah wisata, sebagai contoh di kawasan air terjun Tumpak Sewu, *homestay* sudah gampang ditemui. Meski demikian, bila ingin menggenjot sektor pariwisata, Pemkab Lumajang mesti punya rencana jangka pendek, panjang, menengah, sehubungan dengan pembangunan *homestay* yang layak huni bagi wisatawan.

Di Banyuwangi, pada sejumlah daerah wisata, *homestay* dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dengan cara ini, masyarakat setempat bisa memperoleh penghasilan dari sumber baru. Gagasan ini cocok direplikasi oleh daerah lain. Sebagai catatan, Banyuwangi merupakan kawasan yang berhasil melakukan *rebranding* di mana di masa silam, mereka akrab dengan kesan “santet”, menjelma jadi daerah wisata.

Kementerian PUPR memiliki program pembangunan dan pembenahan infrastruktur di wilayah super prioritas maupun non-super prioritas. Selain wilayah Gunung Semeru, bisa jadi Lumajang tidak mendapat “jatah” tersebut. Meski demikian, bukan tidak mungkin, Lumajang bisa mendapat alokasi dari program lain di kementerian tersebut. Prinsipnya, mesti ada komunikasi di level pemerintah lokal, regional, dan nasional, untuk perbaikan infrastruktur di aspek sumber daya air, bina marga, cipta karya, maupun perumahan. Kecakapan eksekutif untuk berkoordinasi mutlak diperlukan.

Infrastruktur yang baik tidak hanya berimbas positif pada sektor pariwisata. Lebih dari itu, ia dapat memberi pengaruh konstruktif terhadap kualitas hidup manusia. Di sektor bisnis dan ekonomi, ia memperlancar dan mengamankan. Sedangkan masyarakat ikut terbangun rasa percaya diri dan terpupuk mentalitasnya. Ilustrasinya, di kala sarana dan prasarana di sebuah kawasan sudah bagus, masyarakat pasti lebih bergairah untuk belajar, bekerja, ataupun berkarya. Oleh sebab itu, pemerintah mesti punya konsentrasi khusus pada pembangunan infrastruktur.

Dengan menata infrastruktur secara inklusif dan berorientasi pada edukasi, Lumajang tidak hanya membangun akses fisik menuju destinasi wisata, tetapi juga menciptakan ruang pembelajaran yang hidup bagi generasi muda. Jalur-jalur menuju lokasi wisata dapat dilengkapi dengan papan informasi edukatif tentang lingkungan, sejarah, hingga mitigasi bencana. Misalnya, perjalanan menuju Air Terjun Tumpak Sewu dapat dirancang sebagai *edutrack* yang menyisipkan narasi geologi, sejarah erupsi Gunung Semeru, hingga nilai-nilai konservasi. Infrastruktur seperti ini berfungsi ganda: memperlancar mobilitas sekaligus menumbuhkan literasi publik di ruang terbuka.

Homestay, warung rakyat, dan pusat UMKM yang berada di kawasan wisata juga bisa menjadi wahana pelatihan kewirausahaan bagi anak muda. Dengan dukungan infrastruktur yang layak, anak-anak muda Lumajang dapat dilibatkan dalam program wisata edukatif sebagai pemandu, narasumber, kreator konten digital, atau pelaku ekonomi kreatif lokal. Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan,

dan pelaku wisata diperlukan agar setiap titik destinasi bukan sekadar tempat berswafoto, tetapi menjadi *kelas terbuka* yang memberdayakan. Infrastruktur yang mendukung proses ini harus ramah, aman, dan kontekstual dengan kebutuhan pengembangan karakter generasi muda.

Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur di sektor pariwisata harus dipahami sebagai investasi jangka panjang dalam pendidikan nonformal yang berbasis lokalitas. Wisata edukatif bukan hanya solusi kreatif bagi kebosanan sistem pendidikan konvensional, melainkan juga pendekatan transformatif yang menempatkan anak muda sebagai subjek pembangunan. Jika Lumajang mampu membangun infrastruktur wisata yang mendidik, inklusif, dan aman, maka ia akan menjadi pionir dalam merumuskan masa depan pariwisata yang berbasis pengetahuan dan karakter, bukan semata konsumsi visual dan ekonomi sesaat.

Kebijakan Aplikatif dan Pembangunan Berkelanjutan

Pariwisata tidak lagi hanya dimaknai sebagai aktivitas rekreasi semata, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pembangunan karakter, khususnya bagi generasi muda. Di tengah transformasi paradigma pembangunan global, pendekatan wisata edukatif menjadi penting untuk menciptakan ruang-ruang yang memadukan eksplorasi, pengalaman, dan pembentukan nilai. Lumajang, dengan kekayaan alam dan budaya lokalnya, memiliki potensi besar untuk menjadi laboratorium pendidikan di alam terbuka. Namun, gagasan ini hanya bisa diwujudkan apabila kebijakan pembangunan daerah selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang digagas PBB menjadi kerangka penting dalam merumuskan arah kebijakan wisata edukatif. Poin-poin seperti *Quality Education*, *Decent Work and Economic Growth*, *Sustainable Cities and Communities*, hingga *Life on Land* dan *Partnership for the Goals*, semuanya mengafirmasi pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi

juga memberi nilai tambah dalam bidang pendidikan, sosial, dan pelestarian lingkungan. Wisata edukatif bagi anak muda di Lumajang dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Wisata edukatif juga berperan dalam mendekatkan anak muda pada realitas lokal dan kearifan budaya setempat. Ketika destinasi wisata dikembangkan tidak hanya untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk menjadi ruang belajar aktif tentang sejarah, ekologi, hingga dinamika sosial-ekonomi, maka dampaknya akan jauh lebih dalam. Anak muda tidak sekadar menjadi penikmat pemandangan, tetapi juga pelaku transformasi sosial yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga alam, mengenal budaya, dan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan daerahnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang terkait pengembangan pariwisata di Lumajang semestinya diarahkan pada misi edukatif ini, bukan sekadar mengejar kuantitas kunjungan.

Pada 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggariskan tujuh belas poin *Sustainable Development Goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan¹⁰. Resolusi tersebut menjadi inspirasi pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semua kebijakan publik di level desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional diharuskan punya keselarasan dengan satu atau lebih poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tersebut.

Poin-poin yang dimaksud adalah; *No Poverty* atau tanpa kemiskinan, *Zero Hunger* atau tanpa kelaparan, *Good Health and Well-Being* atau kehidupan sehat dan sejahtera, *Quality Education* atau pendidikan berkualitas, *Gender Equality* atau kesetaraan gender, *Clean Water and Sanitation* atau air bersih dan sanitasi layak, serta *Affordable and Clean Energy* atau energi bersih dan terjangkau. Poin lainnya yakni: *Decent Work and Economic Growth* atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, *Industry, Innovation and Infrastructure* atau industri, inovasi, dan infrastruktur. Selain itu; *Reduced Inequalities* atau berkurangnya kesenjangan sosial, *Sustainable Cities and Communities* atau

¹⁰ United Nation, "About the Sustainable Development Goals," *Www.Un.Org*.

kota dan pemukiman yang berkelanjutan, *Responsible Consumption and Production* atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, *Climate Action* atau penanganan perubahan iklim, *Life Below Water* atau ekosistem lautan, *Life on Land* atau ekosistem daratan, *Peace, Justice, and Strong Institutions* atau perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta *Partnership for The Goals* atau kemitraan untuk mencapai semua tujuan.

Tujuh belas poin ini dibagi jadi empat pilar, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum & tata kelola. Poin TPB pertama hingga kelima masuk kategori pilar pembangunan sosial. Poin TPB ketujuh sampai kesepuluh dan tujuh belas masuk kategori pilar pembangunan ekonomi. Poin TPB keenam, kesebelas serta lima belas termasuk pilar pembangunan lingkungan. Sedangkan poin TPB keenam belas merupakan pilar pembangunan hukum dan tata kelola ¹¹.

Gagasan untuk pengembangan potensi objek wisata punya keselarasan dengan banyak poin TPB, khususnya pada pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Poin yang dimaksud antara lain, *No Poverty* dan *Zero Hunger*. Dengan berkembangnya pariwisata, ekonomi masyarakat terangkat sehingga diharapkan tak ada lagi kemiskinan dan kelaparan. Hal itu sejalan pula dengan dengan poin *Decent Work and Economic Growth* atau meluasnya lapangan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Jika taraf ekonomi masyarakat membaik, disparitas atau kesenjangan di masyarakat bisa diatasi. Dengan kata lain, ia selaras dengan poin *Reduced Inequalities*. Sedangkan saat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus bergerak ke arah positif, sebuah kota beserta komunitasnya akan lestari dengan hidup sejahtera secara berkelanjutan. Artinya, ide ini pengembangan sektor pariwisata selaras dengan spirit TPB pada poin *Sustainable Cities and Communities*.

Bila ditarik lebih jauh, cita-cita mewujudkan kawasan pariwisata tidak akan terjadi tanpa sinergi dari segala pihak, dengan

¹¹ Kementerian PPN/Bappenas, "Metadata Indikator," *SDGS Bappenas*.

kata lain program-program yang ada pasti sesuai dengan poin *Partnership for The Goals*. Oleh karena kawasan pariwisata, khususnya di Lumajang, banyak yang berorientasi pada alam baik di daratan maupun di perairan, pasti akan tumbuh kepedulian untuk lebih menjaga lingkungan. Kalau tidak dijaga dengan baik, objek wisata akan menjadi jelek dan kehilangan peminat. Jadi, semua program pengembangan pariwisata alam di Lumajang cenderung punya keselarasan dengan poin *Life below Water* dan *Life on Land*. Poin lain yang selaras dengan cita-cita membangun pariwisata yang berkelanjutan adalah *TPB Industry, Innovation and Infrastructure*. Demi menguatkan pariwisata, perhatian pada infrastruktur mesti ditingkatkan. Saat objek wisata makin dikenal, masyarakat tertuntut untuk berinovasi. Sedangkan industri turunan dari pariwisata antara lain, industri atau ekonomi kreatif serta industri rumah tangga yang melayani kebutuhan-kebutuhan wisatawan, termasuk, penyediaan oleh-oleh atau buah tangan.

Cita-cita untuk memajukan pariwisata di Lumajang adalah tugas dan tanggung jawab semua pihak. Meski demikian, Pemkab Lumajang selayaknya punya perhatian tersendiri. Alasannya, eksekutif daerah selalu punya sumber daya, jaringan, serta pengaruh yang bisa menjadi bahan bakar memajukan pariwisata. Modal awal sudah ada dan banyak. Apa itu? Objek wisata alam yang melimpah di daerah ini. Namun, apakah selama ini Pemkab Lumajang sudah serius untuk membangun pariwisata, atau memang ada skala prioritas lainnya? Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya bisa dijawab oleh semua eksponen masyarakat yang ada di kawasan ini. Bisa pula dijawab dengan melihat seberapa besar porsi promosi pariwisata digelorakan di media sosial resmi Pemkab Lumajang.

Terpenting, semua pihak mesti sadar bahwa kebijakan publik di bidang pariwisata harus diberi atensi khusus. Masyarakat, DPRD, maupun pihak-pihak yang ingin pariwisata Lumajang maju dan berkembang dapat memberikan saran pada Pemkab Lumajang. Kebijakan publik yang representatif adalah langkah yang mau tidak mau harus ditempuh. Bagaimanapun juga, *leading sector* yang paling

layak dalam konteks pengembangan wisata di suatu daerah adalah pemerintah daerah setempat.

Kebijakan publik dari pemerintah selalu punya nilai tawar yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan publik mesti dijalankan melalui sebuah rumusan yang matang. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik harus berorientasi masyarakat, apalagi anggaran yang digunakan memang berasal dari masyarakat melalui pajak yang dibayarkan¹². Kebijakan publik bisa mesti melalui setidaknya tiga tahapan yang serius, di antaranya, perumusan, implementasi, dan evaluasi¹³.

Dalam masing-masing tahapan, eksekutif bisa melibatkan pihak lain. Sebagai misal, di tahap perumusan kebijakan ia bisa mengundang narasumber dari kalangan akademisi yang paham dengan situasi masyarakat. Di tahapan implementasi, umumnya dilakukan oleh eksekutif sebagai regulator, meski imbas dari implementasi bisa mengenai pihak lain. Sebuah aturan, misalnya, pasti mengatur masyarakat. Sedangkan tahapan evaluasi sudah barang tentu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat setempat sebagai pengawas dari eksekutif. Optimalisasi sektor pariwisata di Lumajang merupakan gagasan yang brilian dan konstruktif. Gelombang positif di aspek pembangunan tingkat finansial masyarakat dapat terangkat.

Ilustrasi paling sederhana, subsektor ekonomi kreatif berbasis UMKM absolut turut berkembang. Bisnis kuliner, kerajinan atau kriya, jasa video dan fotografi, hingga desain grafis. Saat orang ingin membuat kenang-kenangan di lokasi wisata, dengan cara dan kemasan yang eksklusif, jasa video, fotografi, dan desain grafis bisa mengambil berperan. Subsektor lain yang punya peluang mengalami musim semi yang menyenangkan adalah pertunjukkan lokal. Penampilan seni dan budaya bisa disuguhkan di tiap objek wisata sebagai bentuk pelayanan tambahan. Narasi atau mitos setempat bisa disampaikan sebagai wawasan sekaligus hiburan.

¹² James E Anderson, *Public Policy Making* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984).

¹³ Tacjhan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006).

Sebagai contoh, di Lumajang ada banyak cagar budaya maupun candi eksotik yang bisa dijadikan objek wisata. Sembari melihat wujud cagar budaya dan candi, pengunjung bisa diberi cerita-cerita mengenai latar belakang kawasan tersebut. Kreatifitas dan inovasi memang berperan paling pokok. Harus diakui, merumuskan, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi kebijakan pariwisata bukan hal yang mudah. Namun, ia juga bukan hal yang mustahil.

Destinasi wisata yang dikelola dengan baik pasti punya korelasi terhadap lonjakan tingkat ekonomi sebuah daerah. Ia menciptakan rantai pasok ekonomi yang panjang dari segala sendi. Sebagai ilustrasi, yang akan kena cipratan kue dari sektor pariwisata itu jasa transportasi, penginapan, restoran, dan kudapan atau oleh-oleh. Dalam konteks Lumajang yang punya banyak objek wisata, kreasi terhadap jasa layanan wisata adalah pemikiran yang segar dan brilian. Apalagi, jika ada kerja sama lintas pihak. Sebagai misal, PT KA berkenan membuat penginapan di seputar stasiun Klakah, yang di sana terdapat cukup banyak lahan kosong, lantas bekerja sama dengan BUMDes sekitar yang membuka usaha jasa pengantaran ke objek wisata. Masing-masing pihak akan mendapat keuntungan.

Hal serupa bisa dilakukan dalam cakupan stasiun Randuagung dan Jatiroto di mana setidaknya hingga 31 Juli 2023 sudah tidak melayani naik/turun penumpang lagi. Dua stasiun itu bisa kembali hidup, mengingat di stasiun Randuagung dan Jatiroto punya posisi strategis dengan banyak objek wisata di sekitarnya. Sebenarnya Lumajang punya satu stasiun lagi: Ranuyoso. Namun, stasiun ini relatif lebih kecil dari pada Klakah, sementara lokasinya hanya sepuluh menit dari stasiun Klakah. Oleh karena itu, optimalisasi stasiun Klakah tentu menjadi lebih logis dan relevan.

Di sisi lain, jasa layanan pariwisata di Lumajang bisa pula memakai model terusan. Sebagai ilustrasi, jika ada BUMDes di Klakah yang membuka jasa layanan pariwisata, ia bisa menawarkan paket integrasi. Selain jalan-jalan di seputar Klakah, ia bisa menawarkan paket ke pantai di Pasirian bahkan air terjun Tumpak Sewu di Pronojiwo. Asalkan dikemas secara menarik, paket wisata dengan rute

terusan dan terintegrasi bisa memberi dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Daya tariknya pun jauh lebih kuat¹⁴.

Model layanan wisata dengan rute integratif ini mirip dengan tiket terusan pada wahana hiburan semisal Wisata Bahari Lamongan dan Dufan. Gagasan sinergitas maupun wisata terintegrasi ini bisa diimplementasikan apabila semua pihak punya komitmen. Kalaupun tidak sama dan sebangun seperti apa yang telah dijelaskan di atas, asalkan memang ada kajian pendukungnya yang lebih apik, pengembangan pariwisata yang lebih modern bisa terwujud.

Tentu saja, Pemkab Lumajang sebagai eksekutif merupakan pihak yang menjadi pemegang komando dan atau regulator. Oleh karena peluang meraih keuntungan material maupun non-material yang besar, Pemkab Lumajang harus punya regulasi kuat saat akan mengimplementasikan tiap kebijakan di bidang pariwisata. Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak berorientasi masyarakat luas yang ingin meraup keuntungan demi dirinya sendiri.

Prinsipnya, kebijakan publik tentang pengembangan pariwisata harus mencakup kebijakan pokok. Tak terkecuali di bidang ekonomi, kebijakan keruangan semisal tentang tata ruang dan tata wilayah objek wisata atau Satuan Kawasan Wisata/SKW, kebijakan pembenahan infrastruktur atau sarana dan prasarana pendukung objek wisata. Tak kalah penting, soal kebijakan promotif untuk objek-objek wisata, baik berupa promosi *online* maupun luar jaringan¹⁵.

Mewujudkan wisata edukatif di Lumajang bukanlah perkara instan, melainkan memerlukan visi jangka panjang, kolaborasi lintas sektor, dan regulasi yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Lumajang, perlu merancang kebijakan publik yang aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

¹⁴ Arie Setiadi Moerwanto and Triono Junoasmono, "Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi," *Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)* 3, no. 2 (2017): 1–12.

¹⁵ Yulianty Aliah, "Promosi Cagar Budaya Di Kabupaten Gorontalo," *Buletin Umulolo* 6, no. 1 (2017): 93–99.

Kebijakan tersebut harus mengakomodasi penguatan infrastruktur, pelibatan komunitas lokal, serta integrasi nilai-nilai pendidikan dalam setiap aspek pengelolaan wisata. Edukasi tidak hanya bisa diberikan melalui buku teks, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang bermakna di ruang-ruang wisata yang mendidik.

Lebih dari sekadar destinasi, wisata edukatif dapat menjadi wahana transformasi sosial, tempat anak muda belajar kepemimpinan, kewirausahaan, kepedulian lingkungan, dan nilai-nilai keberagaman budaya. Lumajang, yang memiliki beragam potensi mulai dari kawasan pertanian, ekowisata, hingga situs sejarah, dapat dikembangkan menjadi zona belajar terbuka. Misalnya, desa wisata berbasis pertanian bisa menjadi tempat pelatihan kewirausahaan pangan lokal; kawasan rawan bencana bisa dimanfaatkan untuk edukasi mitigasi bencana; dan cagar budaya dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan apresiasi terhadap sejarah dan warisan leluhur.

Dengan membangun kesadaran kolektif bahwa wisata adalah ruang belajar dan tumbuh bersama, Lumajang memiliki peluang untuk memimpin inovasi wisata edukatif di Jawa Timur, bahkan secara nasional. Anak muda sebagai motor penggerak perubahan akan memperoleh pengalaman berharga, bukan hanya sebagai wisatawan, melainkan sebagai warga yang bertanggung jawab terhadap masa depan daerahnya. Oleh karena itu, investasi dalam wisata edukatif bukan semata strategi ekonomi, tetapi juga komitmen terhadap pembentukan generasi masa depan yang berkarakter, berpengetahuan, dan berdaya saing.

Kesimpulan

Wisata edukatif di Kabupaten Lumajang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wahana pembelajaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan spiritual dan edukatif, destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga ruang internalisasi nilai moral, religiusitas, dan tanggung jawab sosial bagi generasi muda. Dalam perspektif Islam, aktivitas wisata dapat menjadi sarana tadabbur yang menumbuhkan ketakwaan dan cinta lingkungan. Namun, keberhasilan pengembangan wisata edukatif memerlukan

dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan publik yang terintegrasi, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dengan memperhatikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, wisata edukatif di Lumajang dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang cerdas, berakhlak, dan peduli terhadap keberlanjutan alam dan budaya.

Author's Contribution

Arini Indah Nihayaty: Contribute to interpretation results and discussion, to formulating research ideas, collecting data, processing data, interpreting data. research methods

Acknowledgements

The author is grateful to those who helped in the completion of this article, especially during the data collection process and article review.

Declaration of Competing Interest

The author declares that there is no conflict of interest.

Referensi

Al Ubaidi, Hammadi. *Maqoshidus Syasriah Al islamiyah asy Syathibi*. Darul Qutaibah: 2000.

Ahmad Toha Ali Muhammad *Annudhum Al Islami* Maktabah Iman 2001.

Muhammad zaki Annasy riki *Al milal Wannihal* Maktabah iman 1989.

Muhammad Ali Ali Syahin *Attabsyir Walisyisyraq* Alhalabi Kairo 1949.

Said Toha Ahmad Darras *Annudum Al Islami* Maktabah Iman 2001.

Muhammad Almasyriki *Addakwah Almuashirah* Darul Hujah. Kairo 2011

Aldzahabi, Muhammad Husain. *Attafsir Walmufassirun*. Darul Hadits: 2005

Almu'mul Washith Majma'ul. *Lughab Jumburiayah Mesir Al arabiyah*. Maktabah Syuruq Al Dauliah: 2008.

Athohir, Muhammad bin Asyur. *Maqoshidus Syariyah Al Islamiyah*. Darus Salam: 2020.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Almu'jamul Mufabrosul Alfadul qur'an Al karim*. Darul Hadits: 2001.

Fattah, Assyaikh Abdul. *Tuzẓaman Indal Ulama'*. Darus Salam: 2010.

- Gomaah, Ali. *Almadkhal ila dirosatil madzhab Al fiqhiyah*. Darus Salam: 2007.
<https://www.antaranews.com/berita/2361538/menakar-upaya-cegah-ujaran-kebencian-di-ranah-publik>
- Majma' Allughoh Alarabiyah mesir Alarabiyah. *Almujamul Washith*. Maktabah Syuruq: 2008.
- Majma' Buhuus, *Tafsir al-Qur'an Al-muyassar. surat al-azumar ayat 9*. Kairo: Darul Alamiyah. 2003.
- Muhammad bin Ahmad. *Bidayatul Mujtabid Wanibayatul Muqtasid Al imam Alqodi Abilwalid*: 2004.
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- M. Nazir, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Qodhowi, Muhammad Yusuf. *Assubwatul Islamiyah minal murobaqob ilarrusydi*. Darussyuruq: 2006.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi*. Cet. VIII Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Shobuni, Muhammad Ali. *Shofwatutafasir Tafsir Lilqur'anilkarim*. Darusshobuni: 2002.
- Shobih Bukhori Muslim* Darul Hadis: 2005.
- Tontowi, Muhammad Sayyid. *Attafsir Wasith Lilqur'anil Karim* Darusshobuni: 2001.
- Ulwan, Abdullah Nasih. *Madrasatuddakwah*. Darussalam: 2008.
- Yusuf, Muhammad Sayyid. *Minhajul Qra'an Al karim fi Isblabil Mujtama'*. Darus Salam: 2007.